

BANTEN MASIH WASPADA KORUPSI

SERANG, BANPOS – Provinsi Banten masih berada dalam kategori waspada korupsi meski indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Diketahui, capaian hasil SPI atau Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2025, Provinsi Banten meraih skor 73,22 dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) meraih skor 89. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan skor 71,21.

Kendati demikian, kondisi tersebut masih menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pemerintah daerah memperbaiki sejumlah aspek tata kelola pemerintahan. Perbaikan meliputi pelayan-

an publik hingga manajemen sumber daya manusia.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumaastuti mengatakan, kenaikan poin pada indeks persepsi korupsi belum cukup untuk membuat Banten keluar dari kategori waspada. Karena itu, masih ada sejumlah area yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

"Kalau indeks persepsinya di Banten kan memang masih waspada walaupun sudah naik poin daripada tahun sebelumnya. Kalau masih waspada berarti masih ada beberapa area yang memang harus kita perbaiki lagi," kata Eli saat ditemui usai agenda pendidikan, supervisi, dan pencegahan korupsi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) BACA **BANTEN MASIH HAL** - 9

Dua Tahun Prabowo-Gibran

BEM se-Banten Tagih Janji Kesejahteraan

SERANG, BANPOS – Hari Peringatan Sumpah Pemuda yang juga memperingati Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menagih janji kesejahteraan yang disampaikan sejak masa kampanye. Bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), BACA **BEM HAL** - 9



FOTO-FOTO: DZIKI OKTOMAUJIYADIBANTEN POS



AKSI REFLEKSI SUMPAH PEMUDA

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (28/10). Aksi tersebut merupakan bagian dari refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda.



SUMPAH PEMUDA DI BANTEN

PEMUDA DITUNTUT BERAKSI NYATA

SERANG, BANPOS – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Provinsi Banten, Rabu (28/10), menjadi momentum untuk mendorong generasi muda mengambil peran nyata dalam pemba-

ngunan daerah. Semangat patriotisme, kegigihan, dan empati dinilai perlu diwujudkan melalui kontribusi langsung dalam menjawab persoalan masyarakat.

Seruan tersebut mengemuka dalam sejumlah kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Banten, mulai dari upacara di Polda Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, hingga Pemerintah Kota

Cilegon. Di sisi lain, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Badan Koordinasi (BADKO) Banten mendesak pemerintah BACA **PEMUDA HAL** - 9

Vox Populi



Haidar Ch Widodo
WARTAWAN BANTEN POS

Bangsa Ditengah Circle Kolaps

DI sudut pinggir kota, sang kakek maestro terlihat berjalan menyusuri trotoar, nampak ia seperti kelelahan. Lalu ia duduk termenung di sebuah sudut tembok kota, suasana masih dilanda kemarau panjang.

Tak sengaja aku melihatnya, dan ku coba mendekat untuk menawarkan minum. Sedikit ia menoleh dan menatapku, lalu mengernyitkan dahi dan tersenyum mengangguk.

BACA **VOX POPULI HAL** - 9

PENGUSAHA JANGAN RAGU LAPOR POLISI

DISNAKERTRANS BANTEN TELUSURI HENGKANGNYA PWI 6

SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan akan menelusuri penyebab perpindahan perusahaan manufaktur alas kaki tersebut. Sementara itu, Polda Banten mengimbau pelaku usaha yang mengalami gangguan, intimidasi, atau dugaan pungutan liar (pungli) agar segera melapor kepada kepolisian.

BACA **BPJS WAJIB HAL** - 9

Santri Championship 2026 Jadi Panggung Atlet Muda Banten

Oleh: **Aceng Murtado**

KEJUARAAN Pencak Silat Santri Championship 2026 menjadi panggung bagi atlet-atlet muda di Provinsi Banten untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya di bidang bela diri.

Kejuaraan yang digelar di Pondok Modern Darel Azhar, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, ini diikuti ribuan peserta dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

BACA **SANTRI HAL** - 9



ISTIMEWA/BANTEN POS

DIDUGA BOCOR, RAZIA PKL PASAR BADAK SEPI PEDAGANG

03

EKS DIREKTUR HOTEL DITUNTUT RINGAN

04

KASAT BUNGKAM SOAL RENCANA SIDAK KOS-KOSAN PER JAM

07

RAIH EMAS DI ASIAN PARA GAMES

08

10 KAWASAN INDUSTRI TAK MILIKI IPAL

12



SERANG, BANPOS - Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurnia-wan memberikan piagam penghargaan kepada lima personel Polda Banten atas dedikasi dan pengabdian luar biasa mereka dalam menyelesaikan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afrika Tengah. “Pemberian penghargaan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas keberhasilan para personel dalam membawa serta menjaga nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di kancah internasional,” kata Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurnia-wan, di Serang, Rabu (28/10).

Kelima personel tersebut diketahui tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Formed Police Unit (FPU) 7 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization

Mission in the Central African Republic (Minusca) yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah konflik Afrika Tengah.

Adapun kelima jajaran Polda Banten yang berprestasi tersebut yakni AKP Hotma P.A. Manurung, Ipda Anang Yunianto, Brigadir Aga Insanul Hakim, Briptu Hafidz Lutfiyandha, serta Bharatu Mohamad Faiz R.

Kapolda menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa bangga nya atas kedisiplinan serta integritas tinggi yang ditunjukkan oleh para personel selama

menjalankan tugas kemanusiaan skala dunia tersebut. “Saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota yang telah membawa nama baik Polri, khususnya Polda Banten. Bagi rekan-rekan yang telah bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Afrika Tengah, pengalaman berharga ini hendaknya menjadi inspirasi bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan wawasan,” kata Hendra.

Ia menjelaskan bahwa tugas di daerah misi internasional membutuhkan ketahanan fisik, mental, serta keterampilan taktis



yang mumpuni. Oleh karena itu, pengalaman berharga yang diperoleh para personel selama bertugas di Afrika Tengah diharapkan dapat ditularkan kepada jajaran lainnya di Polda Banten.

“Pengalaman dan pengabdian rekan-rekan selama menjalankan misi perdamaian PBB dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Banten untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tuturnya.(ANT/PAY)

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan memberikan piagam penghargaan kepada lima personel Polda Banten di Serang, Rabu (28/10).

RUANG PUBLIK

Dulu Memaki, Kini Melakoni Ketika Kebenaran Berubah Mengikuti Posisi

OLEH:
Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung Mahasiswa Program Magister Prodi Studi Islam Interdisipliner UIN SMHB Serang



SETIAP kali Sumpah Pemuda diperingati, kita kembali mendengar pidato tentang idealisme, keberanian, persatuan, dan tanggung jawab generasi muda. Kata-kata itu terdengar gagah, terutama ketika diucapkan dengan pengeras suara dan disambut tepuk tangan. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan sungguh-sungguh: ke mana perginya idealisme ketika mereka yang dahulu berteriak tentang kebenaran akhirnya memperoleh kesempatan untuk berkuasa? Apakah idealisme ikut tumbuh dewasa, atau justru pensiun dini setelah pemiliknya mendapatkan pekerjaan, jabatan, dan sedikit fasilitas yang dahulu dicurigainya?

Pada masa mahasiswa, sebagian orang tampil sebagai pengkritik yang berani. Mereka mengecam korupsi, nepotisme, politik uang, dan berbagai praktik curang dalam perebutan kekuasaan. Di ruang diskusi, mereka fasih menjelaskan demokrasi dan keadilan. Di halaman kampus, mereka lantang menyuarakan perubahan. Mereka meyakini bahwa jabatan seharusnya diperoleh melalui kompetisi yang sehat, bukan melalui transaksi, kedekatan, atau kemampuan membagi-bagikan keuntungan. Ketika melihat ketidakadilan, mereka merasa berkewajiban untuk menggugatnya. Setidaknya, begitulah mereka mengenali diri sendiri: sebagai generasi yang hendak memperbaiki keadaan.

Kampus memang dapat menjadi sekolah demokrasi. Melalui badan eksekutif

mahasiswa, senat mahasiswa, maupun organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, mahasiswa belajar mengelola perbedaan, menyusun program, membangun dukungan, dan memilih pemimpin. Mereka juga belajar bahwa kekuasaan tidak selalu diperoleh melalui argumentasi terbaik. Ada lobi, negosiasi, konsolidasi, dan perhitungan dukungan. Semua itu tidak dengan sendirinya buruk, sebab organisasi memang membutuhkan strategi. Persoalan muncul ketika strategi tidak lagi digunakan untuk memenangkan gagasan, tetapi untuk memenangkan jabatan dengan cara apa pun. Pada titik itu, organisasi yang semestinya menjadi laboratorium demokrasi justru berpotensi menjadi tempat latihan pertama bagi penyimpangan demokrasi.

Bayangkan seorang aktivis mahasiswa yang berapi-api menggugat politik uang dalam pemilu. Baginya, membeli suara merupakan penghinaan terhadap akal sehat memilih dan merusakkan terhadap kedaulatan rakyat. Namun, ketika tiba giliran dirinya mencalonkan diri sebagai ketua organisasi, ia mulai menggunakan cara-cara yang menyerupai praktik yang dahulu kegiatan kelompok pendukung, memberikan fasilitas kepada calon pemilih, atau menjanjikan posisi tertentu demi pengamanan kemenangan. Tentu, tidak setiap traktiran merupakan politik uang, dan tidak setiap pembiayaan kegiatan adalah transaksi suara. Namun, ketika pemberian sengaja dipertukarkan dengan dukungan, persoalan etikanya tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti nama praktik tersebut.

Di sinilah ironi itu bermula. Ketika lawan melakukan hal serupa, ia menyebutnya kecurangan. Ketika kelompoknya sendiri melakukannya, ia menyebutnya strategi pemenangan. Ketika pihak lain membangun dukungan melalui transaksi, ia berbicara tentang rusaknya demokrasi. Ketika dirinya melakukan hal yang sama, ia berbicara tentang dinamika organisasi. Seolah-olah tindakan yang sama memiliki nilai moral berbeda hanya karena pelakunya berganti. Barangkali, dalam kamus politik yang sedang berkembang itu, kecurangan adalah tindakan lawan yang berhasil, sedangkan strategi adalah kecurangan sendiri yang

membuahkan kemenangan.

Fenomena tersebut membawa kita kepada pertanyaan yang lebih mendasar: jangan-jangan, bagi sebagian orang, kebenaran itu tergantung pada posisi tempat mereka berdiri ketika memberikan penilaian. Ketika berada di luar kekuasaan, mereka menuntut agar kekuasaan tunduk kepada kebenaran. Namun, ketika sudah berada di dalamnya, mereka mulai berharap agar kebenaran memahami kepentingan kekuasaan. Prinsip yang dahulu berdiri tegak perlahan-lahan menjadi lentur, bukan karena ditemukan argumen baru yang lebih kuat, melainkan karena kepentingan telah berpindah tempat. Yang berubah bukan selalu pemahamannya, melainkan ukuran yang digunakannya untuk membenarkan tindakan sendiri.

Dalam filsafat, kita perlu membedakan kebenaran dari penilaian manusia terhadap kebenaran. Manusia memahami kenyataan melalui pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang yang terbatas. Karena itu, pendapat seseorang dapat berubah ketika ia memperoleh informasi baru atau menyadari kekeliruan sebelumnya. Perubahan semacam ini justru merupakan bagian dari kedewasaan berpikir. Kita tidak perlu mencurigai setiap orang yang mengubah pendirian, sebab bertahan pada pendapat yang keliru bukanlah bukti integritas. Sebaliknya, keberanian mengoreksi diri dapat menjadi tanda kejujuran intelektual.

Namun, ada perbedaan antara mengubah pendapat karena menemukan alasan yang lebih kuat dan mengubah standar moral karena posisi baru menawarkan keuntungan yang lebih besar. Seseorang mungkin dahulu menolak nepotisme karena menganggapnya merusak keadilan. Setelah memiliki jabatan, ia justru menggunakan pengaruhnya untuk memberikan keistimewaan kepada kerabat yang tidak melalui proses yang semestinya. Ketika dikritik, ia menjawab bahwa orang dekat lebih mudah dipercaya. Padahal, kepercayaan personal tidak otomatis membenarkan perlakuan istimewa yang merugikan kesempatan orang lain. Kita boleh mempercayai orang dekat, tetapi jabatan publik dan kesempatan organisasi bukan warisan keluarga yang bisa dibagikan saat makan malam.

Prinsip yang sama berlaku

dalam politik uang dan perebutan jabatan. Jika membeli suara dianggap merusak demokrasi ketika dilakukan oleh lawan, tindakan itu tidak otomatis menjadi bermoral ketika dilakukan oleh kawan. Jika nepotisme dianggap mencederai keadilan ketika menguntungkan orang lain, ia tidak serta-merta menjadi benar ketika memberikan manfaat kepada keluarga sendiri. Perbedaan konteks memang perlu diperiksa, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alasan otomatis untuk menghapus pertimbangan etis. Kita perlu bertanya apakah tindakan tersebut sungguh berbeda secara mendasar atau hanya berbeda pelaku dan penerima keuntungannya. Di sinilah konsistensi moral menemukan ukuran yang sesungguhnya.

Mungkin persoalannya bukan bahwa orang tidak mengetahui mana yang benar dan salah. Sebagian justru sangat pandai menjelaskan perbedaan keduanya, terutama ketika sedang mengkritik orang lain. Persoalannya adalah kemampuan menerapkan ukuran yang sama kepada diri sendiri. Kita mudah menjadi hakim yang tegas ketika orang lain duduk di kursi terdakwa, tetapi mendadak menjadi ahli pembelaan ketika diri sendiri mulai diperiksa. Kata-kata yang dahulu digunakan untuk mengadili orang lain kini dipilih kembali, disusun ulang, lalu dipakai untuk membebaskan diri. Hebatnya, dalam persidangan batin semacam ini, terdakwa sering kali sekaligus menjadi hakim, jaksa, pengacara, dan saksi yang paling dipercaya.

Kita tentu tidak perlu menuduh semua kompromi sebagai pengkhianatan. Kehidupan dewasa memang lebih rumit daripada perdebatan di ruang kuliah. Seseorang harus bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga hubungan sosial, dan menghadapi kenyataan bahwa perubahan tidak selalu dapat dilakukan sekaligus. Idealisme yang matang perlu mengenali keterbatasan, memilih strategi, dan bersedia bernegosiasi. Akan tetapi, pragmatisme berbeda dari oportunisme. Pragmatisme menyesuaikan cara agar tujuan dapat dicapai dalam kenyataan, sedangkan oportunisme mengubah prinsip agar keuntungan tetap berada di tangan sendiri. Yang pertama dapat menjadi kecerdasan bertindak; yang kedua berisiko

menjadi kecerdikan mencari pembenaran.

Di sinilah ujian terbesar idealisme dimulai. Ketika masih menjadi mahasiswa, seseorang mungkin belum memiliki jabatan, akses, atau kepentingan besar yang harus dipertahankan. Menolak kecurangan relatif mudah ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan darinya. Keadaan berubah ketika kita mulai memiliki sesuatu yang dapat hilang: jabatan, pengaruh, dukungan kelompok, atau peluang karier. Pada saat itulah prinsip benar-benar diuji. Idealisme tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menentang kesalahan orang lain, tetapi juga kesediaan menolak pembenaran sendiri, bahkan ketika penolakan itu membuat kita kehilangan kemenangan.

Pengalaman organisasi mahasiswa juga penting karena di sanalah kebiasaan politik dapat mulai terbentuk. Jika seseorang terbiasa menganggap pembelian dukungan sebagai sesuatu yang wajar, ia mungkin membawa pembenaran serupa ke lingkungan yang lebih luas. Tentu, pengalaman masa muda tidak menentukan seluruh perjalanan hidup seseorang. Banyak orang mampu belajar, mengakui kesalahan, dan memperbaiki perilakunya. Namun, kebiasaan membenarkan cara yang keliru dapat meninggalkan jejak. Jika sejak mahasiswa seseorang menganggap kemenangan lebih penting daripada integritas, bukan tidak mungkin ketika dewasa ia hanya memperbesar skala praktiknya, memperluas jaringan pendukungnya, dan memperhalus istilah yang digunakannya.

Karena itu, peringatan Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada romantisme tentang keberanian generasi muda masa lalu atau kebanggaan terhadap generasi masa kini. Sumpah adalah ikrar yang mengandung tanggung jawab. Ia bukan sekadar rangkaian kalimat yang dibacakan dalam upacara, kemudian dilupakan setelah peserta kembali ke kesibukannya. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan kemampuan melampaui kepentingan kelompok demi cita-cita bersama. Dalam kehidupan sekarang, semangat itu dapat diterjemahkan sebagai kesediaan menempatkan keadilan di atas keuntungan sesaat, termasuk ketika kita memiliki kesempatan

untuk mengkhianatinya tanpa segera diketahui orang lain.

Istiqamah, dalam konteks ini, bukan berarti manusia dilarang mengubah pikiran. Kita harus terbuka terhadap pengetahuan baru, berani mengakui kesalahan, dan bersedia memperbaiki pendirian. Namun, keajegan prinsip moral menuntut agar kita tidak mengubah ukuran benar dan salah semata-mata karena kedudukan berubah. Jika dahulu kita menolak politik uang karena merusak kebebasan memilih, kita perlu mempertahankan penolakan itu ketika menjadi kandidat. Jika dahulu kita menentang nepotisme karena mencederai keadilan, kita harus tetap menolaknya ketika kerabat sendiri berpeluang mendapatkan keuntungan. Istiqamah bukan membekukan pikiran, melainkan menjaga agar kepentingan tidak diam-diam menyamar sebagai kebenaran.

Mungkin kita memang tidak membutuhkan generasi yang tidak pernah berubah pikiran. Kita membutuhkan generasi yang mampu berubah tanpa kehilangan integritas, menjadi dewasa tanpa menganggap prinsip sebagai beban, dan memperoleh kekuasaan tanpa menjadikannya ukuran kebenaran. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanya berani menggugat ketidakadilan ketika menjadi korban, tetapi juga berani menghentikannya ketika menjadi pihak yang diuntungkan. Ukuran integritas bukan terletak pada seberapa keras seseorang mengecam kecurangan lawan, melainkan pada kesediaannya menolak kecurangan sendiri, bahkan ketika penolakan itu membuatnya kalah.

Jangan-jangan, persoalan terbesar kita bukan kekurangan orang yang pandai berbicara tentang kebenaran, melainkan kekurangan orang yang bersedia hidup berdasarkan kebenaran yang diucapkannya. Kita bisa meninggalkan kampus, mengganti jaket demonstrasi dengan seragam kerja, dan beralih dari mimbar perlawanan ke meja perundingan. Semua itu bagian dari perjalanan hidup. Namun, jangan sampai idealisme ikut tertinggal di lemari, terselip di antara ijazah dan foto-foto demonstrasi, lalu hanya dikeluarkan setiap tanggal 28 Oktober untuk keperluan seremoni. Jangan sampai kita menghabiskan masa muda untuk memperjuangkan kebenaran, kemudian menghabiskan masa dewasa untuk mencari alasan mengapa kebenaran itu tidak lagi berlaku bagi diri kita sendiri. Wallahualam.*

Malingping, 28 Oktober 2026

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285
No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704
(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA
Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga

JAWAB: Chandra Magga | **REDAKTUR PELAKSANA:** Azmart Tusnedi | **REDAKTUR:** Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | **SEKRETARIS REDAKSI:** Cahya Andini | **REPORTER:** CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede, Aceng Murतोdo | **PENGEMBANGAN BISNIS:** Sobar Rohmat | **IKLAN:** Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | **FOTOGRAFER:** Dziki Oktomaulyadi | **PRA CETAK & PERWAJAHAN:** Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | **GRAFIS:** Ahmad Bukhori | **ACCOUNTING:** Ifroh Hardianti | **ADMINISTRASI KEUANGAN:** Azi Abdurohman | **ADMINISTRASI PAJAK:** Nadia Al Vani | **ADMINISTRASI:** Nia Aryanti | **PEMASARAN:** Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :
Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :
Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12, Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :
PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

T A R I F I K L A N		
TARIF IKLAN	ADVERTORIAL	IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW) : Rp. 47.000/mm kolom	
Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC) : Rp. 69.000/mm kolom	
Hitam Putih Hal. 1 : Rp. 91.000/mm kolom	SOSIAL/KELUARGA	
Warna Hal. 1 : Rp. 134.000/mm kolom	Hitam Putih (BW) : Rp. 30.500/mm kolom	
	Warna (FC) : Rp. 54.500/mm kolom	

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

KOTA BADAK



Kapolres Pandeglang, AKBP Sonny Harsono foto bersama wartawan.

Kapolres Gandeng Wartawan Jaga Kamtibmas

KAPOLRES Pandeglang AKBP Sonny Harsono menggandeng insan pers untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kolaborasi tersebut dinilai penting karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Hal itu disampaikan Sonny saat bersilaturahmi dengan puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Kelompok Kerja Wartawan (Porwan) Pandeglang di Aula Mapolres Pandeglang, Rabu (28/10). Sonny mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang dimaksud mencakup berbagai elemen, termasuk insan pers, ulama, dan mahasiswa. “Maksud dan tujuan kami mengundang wartawan karena memang slogan dari Bapak Kapolri sendiri adalah Polisi Bersama Masyarakat. Dalam arti masyarakat lebih luas, bisa masyarakat dalam arti media, wartawan, kemudian polisi bersama para alim ulama, polisi bersama mahasiswa dan sebagainya,” kata Sonny.

Ia menegaskan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlu-

kan untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Kondisi tersebut juga dinilai penting untuk mendorong masuknya investasi ke Pandeglang. “Di mana Pandeglang, insya Allah, aman, kondusif, dan terjaga keamanannya. Ketika aman, semua investor akan hadir ke Pandeglang,” ujarnya.

Sonny mengakui, keterbatasan personel menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan di wilayah Pandeglang. Dengan 766 personel, Polres Pandeglang harus menjangkau 35 kecamatan dan mendukung pengamanan melalui 24 kepolisian sektor (polsek). “Kami tidak bisa sendirian. Untuk itulah kami menjalankan program prioritas dari Bapak Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, wartawan senior Pandeglang, Agus Sandjadiraja, menyambut baik inisiatif silaturahmi tersebut. Ia menilai, komunikasi antara kepolisian dan insan pers perlu terus diperkuat untuk mendukung keterbukaan informasi serta kemajuan daerah. “Sinergi antara Polres Pandeglang dan insan pers selama ini telah terjalin dengan baik. Hubungan baik ini perlu terus dipertahankan dan diperkuat guna mendukung kemajuan daerah secara bersama-sama,” katanya.(DHE/PAY)



PANDEGLANG

Diduga Bocor, Razia PKL Pasar Badak Sepi Pedagang

PANDEGLANG, BANPOS - Penerbitan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Badak Pandeglang, Rabu (28/10), diduga bocor sebelum petugas gabungan tiba di lokasi. Saat razia berlangsung, petugas tidak menemukan pedagang yang berjualan di trotoar maupun bahu jalan. Sejumlah barang yang diduga ditinggalkan pedagang justru ditemukan dalam kondisi telah dirapikan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tibum) Satpol PP Pandeglang, Edi Mulyadi, menduga informasi penerbitan telah diketahui para pedagang sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui pihak yang diduga membocorkan informasi tersebut. “Saya lihat ini kemungkinan ada yang membocorkan kegiatan ini, tapi saya tidak tahu siapa yang membocorkan itu,” kata Edi kepada wartawan di lokasi penerbitan.

Meski tidak menemukan pedagang yang berjualan, petugas tetap mengamankan sejumlah barang di lokasi. Barang-barang tersebut antara lain meja dan sisa pembongkaran lapak. “Beberapa barang tadi kami amankan seperti meja, terus



Petugas Satpol PP Pandeglang, saat melakukan razia PKL.

bekas-bekas pembongkaran. Kalau barang dagangannya nggak ada, karena mungkin mereka sudah tahu kami bakal ke sini,” ujarnya.

Edi menegaskan, penerbitan dilakukan untuk menegakkan aturan yang melarang PKL berjualan di fasilitas umum. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. “Kita

laksanakan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008, bahwa pedagang kaki lima itu tidak boleh berjualan di atas trotoar, bahu jalan, tepi jalan, dan taman hijau,” tegasnya.

Untuk mencegah pedagang kembali menempati trotoar dan bahu jalan, Satpol PP Pandeglang berencana meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin di kawasan tersebut. Pengawasan dijalankan mulai Kamis (29/10). Edi

mengatakan, pedagang yang masih melanggar akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada petugas terkait untuk diproses lebih lanjut. “Mulai besok kami akan lakukan pengawasan di lokasi ini. Kalau masih seperti itu saja, nanti akan saya limpahkan kepada PPU dan PPNS dan akan ada sanksi juga sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.(DHE/PAY)

Tekan Kebocoran, Bapenda Siapkan Agen Pajak hingga Desa



Kepala Bapenda Pandeglang, Ramadanani foto bersama usai peresmian gedung pelayanan pajak daerah.

PANDEGLANG, BANPOS - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang menyiapkan agen pajak di tingkat desa untuk memperluas basis wajib pajak (WP) sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah. Agen tersebut akan membantu pendataan, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Kepala Bapenda Pandeglang, Ramadanani, mengatakan agen pajak berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan melalui keputusan bupati. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan Bapenda untuk menjangkau potensi pajak yang belum terdata. “Agen pajak ini akan menjadi ujung tombak kami, mata dan telinga Kepala Bapenda. Maka, agen pajak ini ditunjuk dan

diangkat melalui keputusan Bupati Pandeglang,” kata Ramadanani kepada wartawan se usai peresmian gedung pelayanan pajak daerah, Rabu (28/10).

Meski berstatus sebagai perangkat desa, agen pajak memiliki tanggung jawab kepada Bapenda dalam urusan pengelolaan pajak. Skenario tersebut diharapkan mempermudah koordinasi pendataan dan pengawasan potensi penerimaan daerah hingga tingkat desa. “Walaupun mereka bekerja di pemerintah desa sebagai perangkat desa, tanggung jawab urusan pengelolaan pajak itu langsung kepada Kepala Bapenda,” ujarnya.

Untuk memangkas kendala jarak, Bapenda juga menyiapkan layanan administrasi perpajakan berbasis digital. Warga di wilayah Cibitung, Cikeusik, Cimanggu, dan Sumur dapat mengurus dokumen melalui agen pajak tanpa harus datang langsung ke pusat Kabupaten Pandeglang. “Warga cukup melalui agen pajak. Dokumen bisa dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian kami validasi dan memberikan umpan balik,” katanya.

Selain mendata wajib pajak baru, agen pajak akan membantu memperbarui data potensi pajak daerah, termasuk yang berkaitan dengan investasi dan transaksi tanah. Bapenda juga menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan administrasi perpajakan bagi investor. “Kalau ada investor atau pengusaha yang mau membeli lahan dan melapor kepada kami, kita akan fasilitasi. Kami tidak akan mempersulit investor,” tegas Ramadanani.

Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Yango, berharap program tersebut berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempersempit peluang kebocoran penerimaan. Ia juga meminta agar wajib pajak yang selama ini belum terdata dapat dijangkau melalui keberadaan agen di desa. “Kami berharap, ke depan tidak ada lagi kebocoran pajak dan pendapatan asli daerah meningkat. Wajib pajak yang belum terdata juga bisa dijangkau melalui agen-agen pajak,” kata Yango.

Selain menyoroti penerimaan pajak, Yango meminta Kantor Pertanahan mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset sekaligus mencegah potensi sengketa.(DHE/PAY)

Kekeringan Landa 30 Kecamatan, BPBD Salurkan 2,9 Juta Liter Air



BPBD-PK Pandeglang, saat menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

PANDEGLANG, BANPOS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang telah menyalurkan 2.976.000 liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan. Bencana tersebut dilaporkan berdampak terhadap sekitar 206.300 jiwa dari 61.002 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 109 desa pada 30 kecamatan.

Bantuan air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang kesulitan memperoleh air akibat

berkurangnya sumber air selama musim kemarau.

Sekretaris BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana, mengatakan penyaluran air dilakukan dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. “Penyaluran air bersih ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Bantuan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, dengan memprioritaskan masyarakat yang mengalami keterba-

hutan akses terhadap sumber air bersih,” kata Nana kepada wartawan, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, kekeringan berkepanjangan berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan air sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mandi, hingga mencuci. Karena itu, BPBD-PK terus memantau kondisi wilayah terdampak untuk menyesuaikan penyaluran bantuan dengan kebutuhan masyarakat. “BPBD-PK Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk terus hadir dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sela-

ma masa kekeringan,” ujarnya.

Nana mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan mendasak. Warga juga diminta segera melaporkan kesulitan memperoleh air bersih kepada aparat setempat agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Warga juga diharapkan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ungkapnya.(DHE/PAY)

IKLAN LARIS

Info Iklan:
- 081334404392
- 087508831183

KEHILANGAN

Telah Hilang map biru yang berisi SHM a/n Enny Ambarita jl.Andalan raya 7 Berngam binjai,surat ukur No. 185/berngam/2002,luas 135 M2,AJB a/n Enny Ambarita dan Bpkb motor a/n Enny Ambarita

Telah Kehilangan 1 Ekslembar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - BPKB R2 NOPOL: A-6101-DZ, Tahun Pembuatan: 2023/2024, Warna: Merah Hitam,

NOKA: MH1JM8124124PK317277, NOSIN: JM81E2317432, WARNA TNKB: PUTIH ATAS NAMA: PELAPOR, Diketahui Hilang pada Tanggal 13Oktober 2026 Pukul 23.00WIB Di Jl. Perumahan Waringinkurung, Waringinkurung, Kabupaten Serang Banten

Kehilangan 1 (satu) buku BPKB kendaraan R4 merk Toyota Type Camry 3,5 Q AT, Plat Nomor B 25 JOY. Nomor rangka : MR053KK40A9002293 Nomor Mesin : 2GR0750023 atas nama TAN IE CIAW nomor BPKB :

H05465816

Kehilangan di kantor PT. BAJA PERKASA SENTOSA yang beralamat di Jl. Lanud Gorda KM 1, No. 9, Cikande, Kampung Maja, Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42185

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW yang beralamat di jln pluit sakti 4/34 RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec. Penjaringan Kota. Jakarta utara Prov. DKI Jakarta HP 081399356786

Kehilangan: BPKB Dan STNK Mobil Suzuki Futura B 9352 CUB NOSIN : G15AID942107 NOKA : MHYESL415EJ305618 Hub : 085697455893

TELAH HILANG (1) SATU EKSELEMPAR SURAT BERTANGGUNG JAWAB BPKB SEPEDA MOTOR - BPKB R2 Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 an. H.SALAMI dengan No. Pol A 6302 CQ No. Rangka MH1JFP128GK780124 No. Mesin JFP1E2761401 yang dikeluarkan oleh sat lantas polresta serang kota

TELAH HILANG SURAT TANAH : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01447 NIB : 28.04.01.10.02331 Surat Ukur No. 33/PETE / 2008, Luas 60 m2 Desa Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten, AN. IBRAMSA.

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE
www.banpos.co

EMAIL
iklanbantenpos@gmail.com

TWITTER
@bantenpos

INSTAGRAM
banten_pos

FACEBOOK
facebookbantenpos

YOUTUBE
Banpos Channel



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

Revitalisasi Pasar Kranggot Terganjal Sertifikat dan Penilaian Aset

CILEGON, BANPOS – Rencana revitalisasi Pasar Kranggot, belum memasuki tahap pembangunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih menunggu hasil penilaian bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta penyelesaian satu sertifikat aset yang ditargetkan rampung pada November 2026.

Kedua tahapan tersebut menjadi prasyarat sebelum Pemkot Cilegon melelang pemilihan mitra pembangunan pasar. Sementara itu, kepastian lokasi relokasi pedagang dan besaran sewa kios setelah revitalisasi juga masih dalam pembahasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Didin Supriatna Maulana, mengatakan revitalisasi Pasar Kranggot telah masuk dalam program Wali Kota Cilegon. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan administrasi aset, termasuk penilaian bangunan untuk menentukan nilai sebelum pembongkaran dilakukan. “Ya, insyaallah ini sudah masuk ke program Pak Wali. Sekarang sedang tahap penilaian bangunan. Jadi, persiapan-persiapan kita harus dinilai dulu, bangunan ini nilainya berapa. Setelah itu, baru dibongkar dan dibeli sisa bangunannya,” kata Didin, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, penyelesaian sertifikat menjadi salah satu kendala yang harus dituntaskan. Sebelumnya, Pemkot Cilegon berencana memperoleh anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan Pasar Kranggot, tetapi terkendala kelengkapan sertifikat aset. “Dulu Pemkot mau

dapat anggaran Rp30 miliar untuk membangun Pasar Kranggot. Masalahnya, sertifikat belum lengkap. Sekarang tinggal satu sertifikat lagi, mudah-mudahan November sudah ada. Setelah sertifikat beres dan penilaian KPKNL selesai, baru kita lelang,” ujarnya.

Jika seluruh persyaratan rampung sesuai target, Disperindag berencana memproses lelang calon mitra pada Desember mendatang. Revitalisasi akan menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS), yakni investor membiayai pembangunan dan mengelola pasar selama jangka waktu yang disepakati sebelum menyerahkannya kepada pemerintah daerah. “Investor membangun pakai dana sendiri. Nanti setelah 20 tahun baru diserahkan ke kita. Investor tetap melalui lelang juga, tidak ditunjuk,” tegas Didin.

Setelah mitra ditetapkan, tahapan berikutnya meliputi penyiapan lokasi, relokasi pedagang, pembongkaran bangunan lama, hingga pembangunan pasar baru. Namun, hingga kini, lokasi relokasi sementara masih dikaji dengan mempertimbangkan kedekatan dengan pasar agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu terlalu jauh. Didin menyebutkan, ada dua alternatif yang dipertimbangkan, yakni kawasan Aston serta pemanfaatan jalan dan area parkir di sekitar pasar yang akan ditutup sementara selama pembangunan berlangsung. “Relokasi pedagang kemungkinan dari hasil analisis ada dua alternatif. Pertama, di Aston. Kedua, mungkin jalan dan tempat parkir ditutup untuk dijadikan lokasi sementara selama pa-

sar dibangun. Jadi, tidak jauh dari pasar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Disperindag mulai menyosialisasikan rencana revitalisasi kepada pedagang. Sosialisasi kepada pedagang kios telah dilakukan melalui paguyuban, sedangkan pedagang auning, sayuran, dan pedagang lainnya akan mendapat sosialisasi lanjutan. “Sosialisasi sudah ke sebagian pedagang. Untuk pedagang kios sudah melalui paguyuban. Minggu-minggu ini kita sosialisasi ke pedagang auning, sayuran, dan pedagang lainnya. Secara umum mereka sudah tahu akan ada pendataan,” katanya.

Selain lokasi relokasi, besaran biaya sewa kios setelah pasar selesai dibangun juga menjadi perhatian pemerintah. Disperindag menyatakan tarif sewa nantinya perlu diperhitungkan agar tidak membebani pedagang yang kembali menempati pasar tersebut. “Sewa nanti setelah jadi. Jangan sampai memberatkan pedagang. Jangan sampai dibangun, lalu pedagang merasa keburatan,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 600 hingga 700 kios di kawasan Pasar Kranggot. Pedagang informal atau pedagang emprakan juga direncanakan mendapat tempat dalam pasar hasil revitalisasi. “Dari hasil pendataan terakhir, jumlah kios sekitar 600 sampai 700. Nanti semuanya masuk ke sana. Modelnya seperti mal, jadi akses keluar masuk hanya satu pintu,” pungkasnya. (CR-03/PAY)



Kepala Disperindag Kota Cilegon, Didin Supriatna Maulana berharap revitalisasi Pasar Kranggot dapat menata aktivitas perdagangan dan menyediakan fasilitas pasar yang lebih tertata, Rabu (28/10).

Pemkot Jajaki Kerja Sama Ubah Eks Matahari Lama Jadi Hotel

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menjajaki kerja sama dengan calon investor untuk mengubah fungsi gedung Eks Matahari Lama menjadi hotel dan ballroom. Pemanfaatan aset tersebut ditujukan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menghidupkan kembali bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, mengatakan pengembangan gedung tersebut direncanakan menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS). Melalui skema ini, investor akan membangun sekaligus mengelola fasilitas dalam jangka waktu tertentu sebelum aset atau bangunannya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian. “Lewat skema BGS itu, nanti investor membangun dan mengelola fasilitas dalam jangka waktu yang disepakati, sebelum aset atau bangunannya diserahkan kembali kepada kami sesuai ketentuan perjanjian,” kata Aziz, Rabu (28/10).

Meski demikian, skema pembagian pendapatan antara investor dan Pemkot Cilegon belum ditetapkan. Pemerintah daerah masih harus menghitung kebutuhan investasi, potensi pendapatan, serta besaran kontribusi yang dapat diterima daerah dari kerja sama tersebut. Aziz mengatakan, berbagai ketentuan itu akan dibahas dalam penyusunan draf perjanjian kerja sama. Kontribusi investor masih terbuka, baik melalui pembayaran sewa maupun mekanisme lain yang disepakati. “Kami juga harus menghitung berapa investasi, potensi pendapatannya, apakah ada pendapatan dari sewa saja atau seperti

apa, apakah ada kontribusi per bulan ke Pemkot. Itu semua bakal dibahas saat menyusun draf perjanjian,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Cilegon telah menjalin komunikasi dengan satu calon investor yang tertarik mengembangkan gedung tersebut menjadi hotel dan ballroom. Calon investor itu masih mengkaji data bangunan, kebutuhan biaya, serta ketentuan kerja sama yang akan diterapkan. “Kami dengar dari rencana investor, gedung itu bakal dijadikan hotel dan ballroom. Dari mereka masih mengkaji dulu datanya, aturan kerja samanya seperti apa, sistemnya nanti ke depan seperti apa,” jelasnya.

Pemkot Cilegon juga telah menyerahkan data terkait gedung Eks Matahari Lama sebagai bahan kajian. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi calon investor untuk menghitung kebutuhan investasi sekaligus memperkirakan durasi kerja sama. “Sudah ada komunikasi dengan calon investor, sudah kami sampaikan juga beserta datanya, sehingga nanti mereka bisa menghitung berapa biaya dan lama kerja samanya dengan Pemkot,” ungkap Aziz.

Ia berharap calon investor tersebut serius merealisasikan rencana pengembangan aset. Namun, hingga kini belum ada investor lain yang menjajaki kerja sama tersebut. “Baru ada satu calon investor, mudah-mudahan investor ini bisa serius kerja samanya sehingga bisa ditindaklanjuti,” harapnya.

Sebelumnya, gedung Eks Matahari Lama direncanakan menjadi pusat kuliner. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Pemkot kemudian membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga agar aset tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif. “Kalau sudah ada yang lebih siap, kenapa tidak? Yang penting gedung itu bisa dimanfaatkan dan memberikan pendapatan untuk Kota Cilegon,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan rencana kerja sama perlu didukung kajian kelayakan investasi. Kajian tersebut diperlukan untuk menghitung perbandingan biaya dan manfaat proyek, sekaligus menentukan potensi pembagian keuntungan antara investor dan pemerintah daerah. “Kalau investasi itu pasti ada studi kelayakannya, benefit cost seperti apa, sharing profit sama kita seperti apa. Kan nanti ada kajian dulu,” ujarnya.

Syafrudin menegaskan, perlunya kajian bukan berarti rencana pengembangan gedung tersebut dinilai tidak layak. Calon investor tetap perlu mempertimbangkan berbagai aspek bisnis sebelum mengambil keputusan investasi. “Bukan belum layak, mereka kan bisa melihat juga dari segi aspek bisnisnya itu seperti apa,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Cilegon terbuka terhadap kerja sama dengan pihak ketiga yang bersedia mengembangkan aset tersebut. Lokasi gedung yang strategis menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam perhitungan bisnis. “Yang pasti kita kerja sama dengan pihak ketiga yang mau bersedia. Kalau dilihat dari letak strategisnya, pasti ke aspek bisnis tentunya,” ucapnya. (CR-03/PAY)

PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS TENAGA KERJA

CILEGON JUARA
DAFTAR KEMAJUAN

H. ROBINSAR
Wali Kota Cilegon

FAJAR HADI PRABOWO
Wakil Wali Kota Cilegon

Dikatakannya, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui UPTD Latihan Kerja Kota Cilegon berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pelatihan, seleksi peserta, administrasi, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, serta koordinasi dengan perusahaan mitra.

Sementara itu, APINDO diharapkan menjadi penghubung strategis antara pemerintah daerah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mendorong partisipasi mereka untuk mendukung pengembangan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan terbangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan, yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas.

“Kerja sama ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Cilegon dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, menekan angka pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju Cilegon Juara,” tandasnya. (*)

UPTD Latihan Kerja Disnaker Cilegon Bangun Kerja Sama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan Dunia Industri

DINAS Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui UPTD Latihan Kerja setempat terus berupaya mendorong terwujudnya kerja sama strategis dengan dunia industri dalam penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Kerjasama strategis ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui UPTD Latihan Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan program pelatihan kerja dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh industri, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif, dan siap memasuki dunia kerja.

“Melalui kolaborasi ini, dunia industri diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, memberikan masukan terhadap jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk penempatan kerja, menghadirkan instruktur dari kalangan praktisi industri, serta mendukung pelaksanaan praktik kerja dan uji kompetensi peserta pelatihan,” ujar Sri Widayati kepada Banten Pos di kantornya, Kamis (29/10).

Menurutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja, dunia industri diharapkan dapat memberikan

PROGRAM PELATIHAN UPTD LATIHAN KERJA KOTA CILEGON TAHUN 2026

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH	SATUAN	SUMBER ANGGARAN
1	Pabrik Sealing	16	Orang	APBD KOTA CILEGON 2026
2	Perakasan Minuman Kopi (Barista)	32	Orang	
3	Komputer (Drafting CAD)	32	Orang	
4	Litrik (Cemas Litrik Industri)	32	Orang	
5	Las SMAW 3G	32	Orang	
6	Operator Sapeda Motor	16	Orang	
7	Operator Forklift	16	Orang	
8	K3 Umum	30	Orang	
9	Teknis AC	16	Orang	
JUMLAH		272	Orang	PROGRAM PBK ANGGARAN APBN 2026
1	Komputer (Practical Office Advance)	32	Orang	
2	Operator Sapeda Motor	32	Orang	
3	Litrik (PLBS)	32	Orang	
4	Menjahit	30	Orang	
5	Teknis AC	16	Orang	
6	Tata Raga	32	Orang	
7	Las SMAW 1G	16	Orang	
JUMLAH		190	Orang	PROGRAM PBK ANGGARAN APBN 2026
1	Bahasa Inggris	200	Orang	
2	Bahasa Mandarin	200	Orang	
3	Digital Marketing	16	Orang	
4	Drafter Fkita Structure	16	Orang	
5	Operator Forklift	144	Orang	
6	Security	100	Orang	
7	Perakasan Minuman Kopi (Barista)	16	Orang	
8	Operator K3	90	Orang	
JUMLAH		601	Orang	
Total		1013	Orang	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Sri Widayati, ST, M.M.
NIP. 19691021199603 2 003

Investigasi Berlanjut, KMP Batu Mandi Bakal Diapungkan Pekan Ini

CILEGON, BANPOS – PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak menargetkan pengapungan bangkai KMP Batu Mandi dapat dilakukan pekan ini. Pengapungan menjadi tahapan penting untuk mendukung investigasi lanjutan guna mengungkap penyebab kebakaran kapal yang terjadi pekan lalu.

General Manager ASDP Merak, Umar Imran, mengatakan pihaknya masih menyiapkan proses pengadaan vendor untuk membantu pengapungan bangkai kapal. Setelah kapal berhasil diapungkan, ASDP akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

“Setelah proses pengapungan, kami akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Polairud, serta pihak lainnya untuk proses investigasi,” kata Umar beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, pemeriksaan awal dan pengumpulan keterangan telah dilakukan sejak sehari setelah insiden kebakaran. Namun, investigasi lebih mendalam terhadap bangkai kapal baru dapat dilakukan setelah proses pengapungan. “Dari satu hari pascakebakaran itu sudah dilakukan investigasi, tapi untuk investigasi mendalam harus diapungkan dulu kapalnya,” ujarnya.

Saat ini, ASDP masih mengundang vendor atau menyiapkan proses tender untuk menangani pengapungan KMP Batu Mandi. Proses pengadaan tersebut menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan dilaksanakan. “Sekarang kami masih mengundang vendor atau tendernya dulu untuk membantu pengapungan bangkai kapal KMP Batu Mandi. Mudah-mudahan minggu ini sudah dapat dilakukan,” katanya.

Setelah proses investigasi se-

lesai, ASDP berencana menarik bangkai kapal ke galangan untuk penanganan lebih lanjut. Dua lokasi yang menjadi pertimbangan adalah Galangan Bojonegoro SMI dan galangan di Lampung, tempat kapal tersebut dibuat.

“Dua opsi lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk menarik bangkai kapal setelah investigasi itu di Galangan Bojonegoro SMI atau galangan tempat kapal tersebut dibuat di Lampung,” ungkap Umar.

Umar menambahkan, sebelum insiden kebakaran terjadi, KMP Batu Mandi telah menjalani docking dan perbaikan sejumlah fasilitas pada Maret 2026. Berdasarkan penilaian ASDP saat itu, kapal dinyatakan dalam kondisi layak beroperasi. “KMP Batu Mandi sudah menjalani docking dan perbaikan sejumlah fasilitas pada Maret 2026. Kondisi kapalnya itu setelahnya sang-at layak dan sangat baik juga untuk dioperasikan,” jelasnya. (CR-03/PAY)



Forum KKS Banten Targetkan Sembilan Tatanan Sehat

SERANG, BANPOS - Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Banten menargetkan penguatan dan pemenuhan sembilan tatanan kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Target itu untuk mewujudkan kabupaten dan kota di Banten bersih, sehat, dan mandiri. Upaya ini mendukung percepatan pembangunan daerah berkelanjutan.

Ketua Forum KKS Provinsi Banten Irna Narulita menyebut target itu memerlukan komitmen kuat dan sinergi pemerintah daerah. Sinergi itu mencakup jajaran kecamatan hingga desa. Forum KKS menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Upaya strategis ini dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung agenda percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Banten,” kata Irna.

Irna menilai kader kesehatan menjadi garda terdepan edukasi dan pelayanan berbasis masyarakat. Forum KKS terus mengampayekan kabupaten sehat agar daerah di Banten memperoleh penghargaan Kementerian Kesehatan. Ia juga menjabat Ketua BKOW dan Penasihat TP PKK Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Zainal Mutaqin menjelaskan program KKS merujuk Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005. Regulasi itu mengukur indeks kesehatan lingkungan secara komprehensif. Kesembilan tatanan mencakup kehidupan masyarakat sehat mandiri hingga penanganan bencana.

“Kita terus mengampayekan kabupaten sehat agar seluruh daerah di Banten mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai daerah sehat,” kata Irna.

Zainal merinci tatanan itu meliputi permukiman dan fasilitas umum, pasar rakyat, satuan pendidikan, dan kawasan pariwisata. Tatanan lain mencakup sarana transportasi dan tertib lalu lintas, kawasan perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan bencana. Pemenuhan sembilan tatanan itu memerlukan sinergi pemerintah daerah hingga desa.

Irna menegaskan, KKS berinovasi dan berkolaborasi. Kolaborasi itu memberdayakan kader kesehatan sebagai ujung tombak edukasi.

“Oleh karena itu, kita akan terus berinovasi dan berkolaborasi,” kata Irna.(ANT/AZM)



Kantor Pol PP Kota Serang saat dikunjungi BANPOS untuk wawancara seputar sidak kos kosan Per Jam di Kota Serang, Rabu (28/10).

Kasat Bungkam

Soal Rencana Sidak Kos-kosan Per Jam

SERANG, BANPOS - Rencana penertiban rumah kos yang disewakan per jam di Kota Serang masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Serang, Heri Hadi, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi BANPOS mengenai persiapan sidak hingga pendataan kos-kosan yang diduga beralih fungsi tersebut.

BANPOS berupaya meminta konfirmasi kepada Heri melalui pesan WhatsApp pada Rabu (28/10) pukul 15.18 WIB. Konfirmasi itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Satpol PP dalam

melaksanakan sidak, termasuk apakah pemerintah sudah mengantongi data jumlah dan lokasi kos-kosan yang disewakan per jam. Namun, hingga berita ini ditulis, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Tak berselang lama, pada hari yang sama sekitar pukul 15.32 WIB, BANPOS mendatangi Kantor Satpol PP Kota Serang untuk meminta keterangan secara langsung.

Setibanya di lokasi, seorang perempuan berseragam Satpol PP menyampaikan bahwa Heri sedang berbincang dan meminta BANPOS menunggu.

“Bapaknya lagi ngobrol, saya tidak berani ngomongnya, enggak enak. Nanti ya tunggu,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (28/10).

Perempuan tersebut kemudian masuk ke dalam kantor. Tak lama berselang, ia kembali dan menyampaikan bahwa Heri dapat ditemui melalui Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Dion.

“Bapak tidak bisa ditemui, disuruh ke Pak Dion saja,” imbuhnya.

Namun, saat hendak dimintai keterangan mengenai persiapan sidak kos-kosan yang disewakan

BACA KASAT HAL-8

10 SD Tercatat Rusak Berat di Kota Serang

SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mencatat masih terdapat sekitar 10 sekolah dasar (SD) yang masuk kategori rusak berat. Pemerintah Kota Serang menargetkan perbaikan sekolah-sekolah tersebut dapat ditangani pada 2027 mendatang.

Meskipun begitu, Kepala Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan, pada tahun ini terdapat bantuan perbaikan untuk 38 SD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan tersebut mencakup reha-

Anak Jalanan Bakal Dibina di Perda PEKAT

SERANG, BANPOS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Serang diarahkan tidak hanya untuk menertibkan penyakit masyarakat, tetapi juga memperkuat pembinaan sosial secara humanis. Anak jalanan dan pengemis, misalnya, tidak semata-mata ditertibkan, melainkan didata, dibina, dididik, hingga dibekali keterampilan agar memiliki pilihan hidup yang lebih baik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang, Edi Santoso, mengatakan penyempurnaan Raperda PEKAT juga mencakup sejumlah persoalan yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam perda lama. Di antaranya penanganan kelompok rentan, dampak judi online dan pinjaman online ilegal, praktik bank keliling, serta persoalan minuman keras (miras).

Menurut Edi, sosialisasi Raper-



Sosialisasi Raperda Pekat di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang.

da PEKAT dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai arah pembahasan regu-

lasi tersebut. Ia menegaskan, penyempurnaan perda bukan

BACA ANAK HAL-8



Tim Ampibi Keruk Sampah Setiap Hari Dinas LH Cilegon Kawal Program Kali Bersih Walikota Robinsar

PROGRAM normalisasi kali dan pembersihan sampah di tandon di Kota Cilegon oleh Walikota Robinsar terus digalakkan. Robinsar ingin kali dan tandon yang ada diseluruh pelosok kampung dan wilayah perkotaan bersih dari tumpukan sampah.

Atas program pembersihan kali dan tandon tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon tak berpangku tangan. Dinas LH Cilegon berkomitmen mengawal kebijakan Walikota Robinsar dalam mewujudkan kali yang bersih.

Guna mendukung langkah pembersihan kali DLH Cilegon sejak Januari 2026 lalu telah mensiagakan dan mengerahkan pasukan kebersihan yang disebutnya Tim Ampibi.

Kepala Dinas LH Kota Cilegon Sabri Mahyudin menjelaskan keberadaan Tim Amvibi tersebut dipersiapkan untuk mengeruk tumpukan sampah-sampah di bantaran kali disejumlah titik.

“Pak Walikota Robinsar sedang giat-giatnya melakukan normalisasi kali dan pembersihan tandon. Maka sejak awal tahun ini kita turunkan Tim Ampibi yang turut mengawal kebijakan pimpinan agar semua kali di Cilegon bersih dari sampah,” ujar Sabri demikian ia biasa disapa saat ditemui di kantornya, Rabu (29/10).

Sabri mengungkapkan sejumlah kali saat ini sudah terlihat bersih dari tumpukan sampah. Semisal kali Cibeber yang merupakan prioritas Walikota Robinsar sudah bersih.

“Tim Ampibi yang berjumlah 10 orang ini mulai melakukan pembersihan sampah sejak pagi. Mereka terbagi menjadi dua tim yang tugasnya membersihkan tumpukan sampah disepanjang kali. Alhamdulillah pelan tapi pasti sudah terlihat hasilnya. Bantaran kali khususnya di Kali Cibeber dan sejumlah titik kali lainnya airnya sudah lancar dan bersih,” terang Sabri.

Menurutnya, dengan sudah bersihnya kali dan tandon dirinya berharap agar masyarakat yang tinggal di bantaran kali untuk ikut terlibat merawatnya.

“Semoga dengan adanya kali Cibeber yang bersih dari tumpukan sampah dan sudah di normalisasi maka bisa menangulangi ancaman banjir pada setiap musim hujan tiba. Kita juga berharap agar masyarakat mulai peduli dengan

kebersihan kali dan kebersihan lingkungan,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan Tim Ampibi yang terbagi menjadi dua tim yakni satu menawungi masing-masing empat 4 kecamatan. Akan tetapi saat ini difokuskan di Kecamatan Cibebe, Cilegon, Purwakarta, Grogol, dan Kecamatan Jombang. Selain itu, tim juga tetap memantau kali Medaksa di wilayah Kecamatan Pulo Merak.

Sementara itu, jika melihat dari data yang ada, hampir rata-rata per bulan Tim Ampibi diperkirakan bisa mengangkut 90 ton sampah.

Pada kesempatan ini Sabri juga sempat menceritakan bagaimana perjuangan tim Ampibi yang berjuang membersihkan tumpukan sampah disejumlah kali.

Di salah satu kali, Sabri dan tim Ampibi dibuat tercengang manakala mendapati



tumpukan sampah di salah satu kali di wilayah Cilegon yang tidak wajar.

Tumpukan sampah yang tidak wajar ada kulkas bekas, springbed, Kasur dan lemari berukuran besar yang sengaja dihyutukan oleh warga.

Oleh karena itu dirinya mengajak masyarakat Kota Cilegon, khususnya bagi warga yang tinggal di bantaran kali untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Mari kita jaga bersama adanya sungai atau kali yang ada. Jangan lagi membiasakan membuang sampah di kali. Mari bersama-sama menjaga kebersihan kali. Sudah saatnya masyarakat Cilegon sadar akan pentingnya kebersihan kali,” tandasnya.

Selain mengajak masyarakat di bantaran kali, dirinya juga mengajak pihak kelurahan untuk turut melakukan edukasi kepada warganya akan pentingnya kebersihan lingkungan.

“Jika budaya bersih sudah menjadi tradisi maka kami yakin Kota Cilegon akan terbebas dari banjir. Kuncinya jangan membuang sampah di kali karena ini akan menghambat aliran apalagi nanti di musim penghujan maka masalah banjir menjadi masalah baru bagi kita semua,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Sabri juga memaparka program lainnya untuk meminimisir dampak banjir yakni dengan membuat sumur resapan di wilayah Kecamatan Cibeber yang bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Kota Cilegon.

“Bangunan sumur resapan ini nanti untuk menangkap hujan dan sebagai cadangan. Kita sudah mengusulkan kepada Bapperda agar program sumur resapan ini dimasukkan dalam DPW Kel Saban Juare. Program sumersapan ini bisa masuk menjadi kegiatan mandatori di kelurahan,” ungkapnya. (***)

DATA SAMPAH DARI AMPIBI DARI KALI - KALI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

NO	HARI DAN TANGGAL	ARMADA	RITASI	VOLUME (M3)	TONASE
1	SELASA/01.09.2026	CATOR	2	4	1.32
2	RABU/02.09.2026	DUMPTRUCK	1	6	1.98
3	KAMIS/03.09.2026	CATOR	2	4	1.32
4	JUM'AT/04.09.2026	CATOR	2	4	1.32
5	SABTU/05.09.2026	GEROBAK	1	2	0.66
6	SENIN/07.09.2026	CATOR	3	6	1.98
7	SELASA/08.09.2026	GEROBAK	2	4	1.32
8	RABU/09.09.2026	GEROBAK	2	4	1.32
9	KAMIS/10.09.2026	CATOR	1	2	0.66
10	JUM'AT/11.09.2026	CATOR	1	2	0.66
11	SABTU/12.09.2026	CATOR	2	4	1.32
12	SENIN/14.09.2026	CATOR	4	8	2.64
13	SELASA/15.09.2026	CATOR	1	2	0.66
14	RABU/16.09.2026	CATOR	2	4	1.32
15	KAMIS/17.09.2026	CATOR	2	4	1.32
16	JUM'AT/18.09.2026	CATOR	1	2	0.66
17	SABTU/19.09.2026	CATOR	1	2	0.66
18	SENIN/21.09.2026	GEROBAK	2	4	1.32
19	SELASA/22.09.2026	GEROBAK	1	2	0.66
20	RABU/23.09.2026	DUMPTRUCK	1	6	1.98
21	KAMIS/24.09.2026	DUMPTRUCK	1	6	1.98
22	JUM'AT/25.09.2026	CATOR	2	4	1.32
23	SABTU/26.09.2026	CATOR	2	4	1.32
24	SENIN/28.09.2026	GEROBAK	3	6	1.98
25	SELASA/29.09.2026	GEROBAK	2	4	1.32
26	RABU/30.09.2026	CATOR	1	2	0.66
TOTAL			45	102	33.66



Raih Emas di Asian Para Games

Atlet Diganjar Rumah dan Mobil dari Gubernur

SERANG, BANPOS - Gubernur Banten Andra Soni memberikan apresiasi kepada Handayani, atlet difabel asal Kota Cilegon yang berhasil meraih medali emas di Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang.

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi gemilang di kancah internasional itu, Handayani menerima hadiah berupa satu unit rumah, mobil, serta uang apresiasi sebesar Rp30 juta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Setda Banten, Rabu, (28/10).

Andra mengatakan, apresiasi itu merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan panjang Handayani hingga mampu mengukir prestasi di tingkat internasional.

Menurut Andra, Handayani bukan hanya berhasil meraih medali emas di Asian Para Games, tetapi juga memiliki rekam jejak prestasi di berbagai kompetisi.

Atlet asal Cilegon itu disebut pernah menjadi juara SEA Games, meraih prestasi di tingkat nasional, hingga menduduki peringkat pertama dunia di cabang olahraga yang ditekuninya.

“Handayani adalah atlet difabel, atlet paralympic atau para games yang bertanding di Asian Para Games Nagoya. Dan alhamdulillah, beliau mendapatkan medali emas. Dan medali emas ini tentu harus kita apresiasi karena ini prosesjuangannya panjang,” kata Andra.

Ia menilai prestasi Handayani patut mendapatkan penghargaan karena merupakan hasil dari proses perjuangan yang panjang. Andra juga menyebut keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten, khususnya warga Kota Cilegon.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Banten turut memberikan uang sebesar Rp30 juta. Sementara rumah dan mobil menjadi bagian dari penghargaan yang diterima

Handayani atas prestasinya.

“Oleh karena itu, banyak apresiasi datang ke beliau. Alhamdulillah, hari ini diserahkan rumah dan sebuah kendaraan mobil, juga dari Pemprov sebesar Rp30 juta,” ujar Andra.

Andra berharap penghargaan tersebut dapat bermanfaat bagi Handayani sekaligus menjadi wujud apresiasi masyarakat terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasinya.

“Dan semoga itu bermanfaat buat Handayani. Inilah bentuk apresiasi masyarakat kepada Handayani,” katanya.

Sementara itu, Handayani me-

ngaku tidak menyangka akan menerima penghargaan berupa rumah dan mobil. Ia menyampaikan terima kasih kepada Andra Soni dan Pemprov Banten atas perhatian yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah banget, terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Pemerintah Provinsi Banten atas apresiasinya,” ujar Handayani.

Handayani mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi pada masa mendatang. Ia berharap pencapaiannya juga dapat mendorong atlet difabel lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

“Enggak nyangka banget, pokoknya. Senang banget, alhamdulillah banget, dan menjadi motivasi buat Handayani buat semakin berprestasi ke depannya,” katanya.

Ia juga berpesan kepada teman-teman difabel agar tidak menyerah dalam mengembangkan minat dan bakat. Menurutnya, setiap orang memiliki potensi yang dapat terus diasah untuk meraih prestasi.

“Semoga buat teman-teman difabel semakin bisa termotivasi buat belajar apa pun, kembangkan bakat, minat bakat dan potensinya, jangan pernah menyerah, dan semoga prestasi-prestasi gemilang bermunculan,” tutur Handayani.(MPD/AZM)

10 SD...

Sambungan dari Halaman 7

pemenuhan mebelair di sekolah. Pengadaan perlengkapan tersebut dilakukan melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan setiap tahunnya.

“Alhamdulillah Pak Walikota sangat konsen soal mebelair. Dia bantu mebelair setiap tahun, itu setiap anggaran perubahan, anggaran murni, yaitu ada pembelajaran mebelair untuk menuntaskan program tadi,” katanya.

Ia menambahkan, kerusakan berat yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah lebih banyak ditemukan di tingkat SD. Sementara itu, untuk jenjang se-

kolah menengah pertama (SMP), terdapat tujuh sekolah yang mendapatkan penanganan perbaikan dengan kategori ringan.

“SD,” kata Zeka saat ditanya mengenai jenjang sekolah yang mendominasi kerusakan berat.

Zeka berharap seluruh sekolah yang masuk kategori rusak berat dapat ditangani pada tahun depan. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan penanganan terhadap sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan.

“Insyaallah tahun besok rusak berat itu semua kita tangani. Dan tinggal nanti rusak sedang dan ringan yang kita coba,” tandasnya.(ACG/AZM)

Kasat...

Sambungan dari Halaman 7

per jam, Dion juga belum memberikan penjelasan. Ia beralasan terdapat tugas mendadak yang harus segera dilaksanakan.

“Oke, sebentar ya, mendadak ini ada perintah,” ujar Dion sembari berjalan menuju mobil.

Salah seorang anggota Satpol PP yang berada di lokasi kemudian menyebut bahwa tugas tersebut kemungkinan berkaitan dengan patroli.

“Ada patroli kayaknya itu,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Serang, Budi Rustandi, menyatakan telah berkoordinasi dengan Kasatpol PP untuk menyiapkan langkah penertiban. Ia bahkan memerintahkan pembentukan satuan tugas di Kelurahan yang terindikasi memiliki banyak rumah kos.

Budi juga memastikan Pemkot

Serang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa penggunaan bangunan dan legalitas usaha kos-kosan.

“Iya dong, pasti (sidak),” tegas Budi kepada awak media, Senin (27/10).

Meski demikian, Budi mengakui belum menerima data lengkap mengenai jumlah kos-kosan yang disewakan per jam maupun lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas negatif.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Repi Rizali menilai, jika Walikota Serang serius menertibkan kos-kosan yang disewakan per jam, seharusnya instruksi kepada Satpol PP sudah jelas. Dengan begitu, Satpol PP dapat menjelaskan tahapan persiapan hingga jadwal pelaksanaan penertiban.

“Kalau memang Walikota serius untuk menindak kos-kosan per

jam, harusnya sudah ada instruksi kepada Satpol PP. Satpol PP juga seharusnya bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, sejauh mana persiapannya, dan kapan akan dilaksanakan,” ujarnya kepada BANPOS.

Menurut Repi, sikap Satpol PP yang belum memberikan kejelasan justru memunculkan tanda tanya di tengah pernyataan tegas Walikota mengenai rencana penertiban.

Ia bahkan menyebut ada tiga kemungkinan yang perlu dijelaskan di balik belum adanya kejelasan tersebut.

“Ini kan aneh. Walikota menyatakan secara tegas akan melakukan penertiban, tetapi Satpol PP justru tidak memberikan kejelasan. Kemungkinannya hanya ada tiga. Pertama, instruksi Walikota hanya omon-omon. Kedua, Satpol PP melakukan pembangkangan. Ke-

tiga, ada kepentingan tertentu yang membuat agenda penertiban ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Meski demikian, Repi menilai apa pun penyebabnya, situasi tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan yang perlu dijelaskan di tubuh Pemerintah dalam upaya menertibkan kos-kosan yang disewakan per jam.

Ia pun melontarkan sindiran keras agar Walikota tidak hanya memerintahkan penertiban terhadap pemilik kos. Repi juga menuntut agar Walikota memastikan jajaran menjalankan instruksi tersebut dengan benar.

“Atau seperti halnya Walikota Serang yang harus sidak dan menertibkan Satpol PP Kota Serang terlebih dahulu. Atau masyarakat Kota Serang yang harus sidak ke kantor Walikota untuk melakukan penertiban,” pungkasnya.(ACG/AZM)

Anak Jalanan...

Sambungan dari Halaman 7

dimaksudkan untuk melegalkan tempat hiburan malam (THM), melainkan memperkuat upaya menjaga nilai-nilai Kota Serang Madani.

“Jangan sampai ada yang memframing bahwa seolah setiap perubahan raperda untuk melegalkan. Malah kita untuk menyempurnakan,” kata Edi.

Ia juga menyinggung persoalan perizinan THM pada masa kepemimpinan Wali Kota Serang sebelumnya, Syafrudin. Edi menyatakan tidak ada perizinan THM yang diterbitkan pada masa tersebut.

Edi menambahkan, sejumlah masukan dari kalangan ulama telah dimasukkan dalam materi penyempurnaan Raperda PEKAT. Hal itu termasuk pengaturan mengenai miras dan upaya mencegah

peredarannya di lingkungan permukiman.

Ia menegaskan, semangat penyusunan regulasi tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari peredaran minuman beralkohol.

Di sisi lain, Edi menjelaskan Raperda PEKAT memiliki ruang lingkup berbeda dengan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisata (PK) yang juga tengah dibahas. Jika regulasi kepariwisataan berfokus pada kegiatan usaha, Raperda PEKAT diarahkan pada penanganan penyakit masyarakat, termasuk persoalan anak jalanan dan pengemis.

Menurutnya, pendekatan terhadap kelompok rentan harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak menyamakan mereka dengan pelaku kejahatan.

“Jangan sampai memperlakukan anak jalanan, pengemis, kayak pelaku kejahatan. Itu kan nanti di perda yang terbaru lebih manusiis, untuk bagaimana dibina, dididik, dilatih untuk lebih punya keterampilan juga,” ujarnya.

Karena itu, penanganan anak jalanan yang kerap ditemukan di persimpangan dan lampu merah akan lebih diarahkan pada pendataan, pembinaan, serta pemberian keterampilan. Pemerintah daerah, kata dia, berkewajiban memberikan edukasi dan mendorong mereka agar memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha yang lebih baik.

Edi mengatakan, pihaknya juga telah mengundang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan tersebut. Ia mengingatkan agar penegakan aturan dilakukan secara konsisten, baik terhadap anak jalanan maupun

terhadap aktivitas tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan.

“Jangan sampai kebalik. Ke anak jalanan, pengemis mau brutal, tetapi ke tempat hiburan melehoi. Poin-poin ini nanti kita perkuat di sana,” tegasnya.

Terkait tahapan pembahasan, Edi menyebut berbagai catatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) akan disampaikan kepada panitia khusus (pansus) sebagai bahan penyempurnaan. Masukan tersebut ditargetkan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan pada 2027.

Dengan penyempurnaan itu, Raperda PEKAT diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penertiban, tetapi juga memberikan arah penanganan penyakit masyarakat yang lebih terukur, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan warga Kota Serang.(MYU/AZM)

LEBIH MUDAH
AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

BANPOS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON Google Play

PORTAL BERITA
E- PAPER
YouTube Channel

banpos channel | www.banpos.co | bantempos@gmail.com | banten_pos | banten_pos

Disnakestrans Banten...

Sambungan dari Halaman 1

Henggangnya PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 dari Rangkas-bitung, Kabupaten Lebak, menyisakan persoalan yang tak hanya menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.100 karyawan, tetapi juga dugaan gang-guan dari oknum tertentu yang disebut-sebut memengaruhi keputusan perusahaan meninggalkan daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, hingga Rabu (28/10), Disnakertrans Kabupaten Lebak belum

Pemuda Dituntut...

Sambungan dari Halaman 1

memastikan pembangunan daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wakapolda Banten Brigien Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 1928 harus tercermin dalam karakter dan tindakan generasi penerus bangsa, bukan sekadar diperingati melalui seremoni tahunan. Pesan itu disampaikan Zain saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Apel Pol-da Banten. Kegiatan tersebut mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.

“Semangat ini harus terus hidup, tidak hanya dalam ingatan, tetapi juga menjadi bagian dari karakter setiap generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Pesan serupa disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Dewi mengajak generasi muda menjadikan semangat perjuangan para pendahulu sebagai dorongan untuk menjadi motor perubahan di daerah. Ia menekankan tiga nilai utama, yakni patriotisme, kegigihan, dan empati.

Menurutnya, patriotisme dapat diwujudkan melalui kecintaan terhadap daerah, menjaga persatuan, serta menangkal penyebaran hoaks dan paham radikalisme. Sementara kegigihan diperlukan untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, inovasi, dan daya saing di tengah perkembangan teknologi digital.

Adapun empati, kata Dewi, harus ditunjukkan melalui kepedulian sosial, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan.

Pemkab Pandeglang juga berharap keterlibatan pemuda di berbagai sektor dapat melahirkan gagasan baru, membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah potensi lokal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menegaskan, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai slogan. Generasi muda perlu menerjemahkan nilai persatuan ke dalam karakter dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Aziz, kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang berkarak-

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

Seperti biasa ia sekonyong-konyong Ia berceloteh tanpa aba. Bercerita tentang sebuah kondisi negeri dan kaum margin proletar yang makin terjepit. Menurutna kini kaum oportunis ramai memanfaatkan situasi, cari peluang untung. Dan mereka kaum oligarki terus menjilat penguasa dengan memelihara keadaan agar terus berpihak pada mereka.

Sementara kaum dagelan, yakni para naya-ga penguasa sibuk membangun pernyataan klarifikasi, padahal fakta yang terjadi tak sesuai dengan retorikanya. Sehingga berdampak pada sang pemimpin jadi bulan-bulanan lelucon, sang maestro berharap itu jangan sampai keterusan.

Kakek maestro terlihat menghe-la nafas, lalu melanjutkan, masihkah petinggi menggemukan badan-badan, memboroskan operasional, di satu sisi finansial negara makin terhimpit. Masihkah membuat program nemu dijalan, masihkah mempertahankan program pemborosan, dan masihkah nepotisme masih dipeliharaya?

Di sisi lain dunia protes asap, hutan terus terbakar untuk sebuah mega komoditas sawit. Pada sisi lain daerah-daerah mulai protes akan pendapatan bagi hasil yang tak adil.

Persatuan bangsa jangan sam-

menerima surat resmi perusahaan terkait perpindahan tersebut. Meski demikian, pihaknya memperoleh informasi bahwa perusahaan telah menyampaikan permohonan secara lisan.

Septo menyebutkan, terdapat sejumlah kemungkinan yang melatarbelakangi keputusan PWI 6 meninggalkan Rangkasbitung, mulai dari berakhirnya kontrak gedung pabrik, persoalan upah minimum sektoral, hingga keterkaitan dengan perpindahan perusahaan lain dalam rantai pasok industri. Menurutna, PWI 6 merupakan bagian dari jaringan usa-

ha PWI yang salah satu unitnya sebelumnya beroperasi di kawasan Cikande. Perpindahan perusahaan dalam rantai pasok tersebut berpotensi memengaruhi keputusan unit usaha lainnya.

“PWI itu ada enam, yang satu sudah pindah, dan ini menyusul. Informasinya ke Jawa Tengah, cuma rinci di mananya kita belum tahu karena laporan tertulisnya belum bikin. Kita enggak mau berandai-andailah. Baru katanya-katanya,” kata Septo.

Di tengah sejumlah kemungkinan tersebut, Septo mengakui pihaknya akan menelusuri dugaan gangguan dari oknum tertentu yang sebelumnya disampaikan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya.

Menurutnya, dugaan itu harus dipastikan agar tidak menimbulkan stigma terhadap masyarakat Rangkasbitung. “Nah, itu yang kita pastikan oknum-oknumnya itu apa, gitu ya. Jangan sampai itu mendiskreditkan warga masyarakat sekitar Rangkasbitung khususnya,” tegasnya.

Septo mengungkapkan, Disna-

kertrans pernah menerima pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan di lingkungan perusahaan. Namun, ia menegaskan, informasi tersebut belum cukup untuk menyimpul-

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.

Di sisi lain, penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK masih berlangsung. Septo menga-

takan, meskipun penyelesaian tersebut semestinya dilakukan pada Juni lalu, pihaknya masih memastikan hak karyawan dibayarkan sesuai ketentuan.

“Kita selalu katakan bipartitnya diomongkan dulu, *win-win solution*. Harus *win-win solution*,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Pol-da Banten Kombes Pol Maruli Ahil-

es Hutapea mengimbau pengu-saha agar tidak ragu melaporkan dugaan gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi. Ma-

ruli mengatakan, laporan dapat di-sampaikan melalui Bhabinkam-tibmas, Polsek, Polres, maupun Pol-da Banten. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan call center 110.

kan adanya gangguan yang menyebabkan perusahaan memin-

dahkan kegiatan usahanya.

Ia juga menyebutkan, belum ada bukti yang dapat disampaikan kepada Disnakertrans mengenai dugaan tingginya biaya tambahan yang harus ditanggung perusa-

haan. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan PWI 6.



Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko

Imigrasi Seragamkan Nama Beranda Layanan Publik

JAKARTA, BANPOS - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Beranda Imigrasi sebagai jenama tunggal bagi 254 titik pelayanan di luar kantor imigrasi. Kebijakan itu memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan lokasi layanan keimigrasian di berbagai ruang publik.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penyeragaman nama mengurangi kebingungan masyarakat. Beragam istilah dan singkatan selama ini digunakan untuk menyebut unit layanan di luar kantor imigrasi. Ia menilai nama tunggal memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan mengenali layanan. “Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge,” kata Hendarsam.

Dari 254 titik layanan, 156 merupakan Mal Pelayanan Publik, 33 Unit Layanan Paspor, dan 20 Immigration Lounge. Selain itu, terdapat 16 LTSP/LTSA, 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi, 13 Ultima I’m SeZ, serta satu Immigration Corner. Penyeragaman nama juga diterapkan pada Google Maps dan aplikasi M-Paspor.

Masyarakat dapat mencari titik layanan dengan mengetikkan “Beranda Imigrasi” diikuti nama wilayah atau lokasi. Contohnya, Immigration Lounge Senayan City Mall kini menjadi Beranda Imigrasi Senayan City Mall. Format seragam itu memudahkan pencarian lokasi layanan.

“Gagasan utamanya ada-

lah menghadirkan area layanan berkonsep ramah dan bersahabat yang mengikis kesan kaku birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban administratif dan profesionalisme,” ungkapnya.

Hendarsam menjelaskan nama Beranda Imigrasi dipilih karena filosofi titik temu terdepan di sebuah rumah. Filosofi itu mencerminkan pelayanan hangat, ramah, dan terbuka bagi masyarakat. Titik layanan di mal, kampus, dan kawasan terpadu mendekatkan layanan keimigrasian.

Penamaan tunggal diharapkan memperkuat pengenalan layanan keimigrasian di ruang publik. Masyarakat lebih mudah mengidentifikasi lokasi melalui nama sama meski jenis unit berbeda. Hendarsam berharap layanan itu menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan.

“Dengan mengusung semangat pelayanan yang dekat, hangat, dan ramah, Beranda Imigrasi siap menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan menuju berbagai penjuru dunia,” pungkas Hendarsam.

Keberadaan titik layanan di pusat keramaian seperti mal dan kampus mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan lokasi tanpa harus mendatangi kantor imigrasi. Penamaan tunggal itu memperkuat pengenalan layanan keimigrasian di berbagai ruang publik. (AZM/RMID)

Modernisasi Laboratorium

Jawab Tantangan Pengawasan Lintas Batas

JAKARTA, BANPOS - Modernisasi laboratorium jawab tantangan pengawasan produk obat dan makanan di tengah perdagangan daring dan transaksi lintas batas. Badan Pengawas Obat dan Makanan mendorong sistem pengawasan berbasis sains dan teknologi. Langkah strategis disiapkan melalui modernisasi laboratorium, digitalisasi pengujian, dan konsep Laboratorium Hijau bersama Asian Development Bank.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Lynda K Wardhani mengatakan proyek itu masuk Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri atau Green Book 2026. Transformasi difokuskan pada tiga pilar utama yang digagas BPOM. Pilar pertama memperkuat kapasitas laboratorium hijau di daerah melalui sarana, prasarana, dan kompetensi sumber daya manusia.

“Transformasi sistem penga-

wasan ini difokuskan pada tiga pilar utama yang digagas BPOM,” katanya.

Pilar kedua berupa digitalisasi pengujian dan integrasi data melalui Laboratory Information Management System nasional. Sistem itu memperkuat keterelusuran data, efisiensi kerja, dan ketepatan pengambilan keputusan. Pilar ketiga mengembangkan konsep Green Laboratory untuk efisiensi energi dan operasional berkelanjutan.

Lynda menyampaikan apresiasi kepada ADB Indonesia Resident Mission atas kunjungan media ke Balai Besar POM di Makassar. Kegiatan itu memperkuat pemahaman mitra pembangunan, media, dan masyarakat mengenai pengawasan obat dan makanan. Media dinilai mitra strategis memperluas edukasi dan literasi masyarakat.

“Keterlibatan media menjadi sangat krusial karena media merupakan mitra strategis

BPOM,” tambahnya.

Sebanyak 10 jurnalis dari media nasional dan asing menyaksikan proses pengujian di laboratorium BBPOM Makassar. Para jurnalis mendapat penjelasan langsung mengenai fungsi pengawasan BPOM secara komprehensif. BBPOM Makassar dipilih sebagai lokasi utama pembangunan laboratorium karena posisinya strategis di kawasan timur Indonesia.

ADB Indonesia Resident Mission Bobur Alimov menyatakan Makassar menghubungkan Sulawesi dan wilayah timur Indonesia. Ia menilai pembangunan regional itu penting bagi Indonesia Timur yang memiliki potensi besar. Makassar merupakan jembatan bagi Timur Indonesia dan salah satu pusat metropolitan terbesar.

“Makassar merupakan jembatan bagi Timur Indonesia dan merupakan salah satu pusat metropolitan terbesar di Indo-

nesia,” ungkap Bobur Alimov.

Kepala BBPOM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa menjelaskan BPOM berperan sentral sebagai garda terdepan ekosistem kesehatan nasional. BPOM memastikan produk obat, suplemen, kosmetik, dan pangan olahan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan bersifat full spectrum dari pre-market hingga pro-justitia.

“Pengawasan BPOM bersifat full spectrum yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai pengawasan yang tidak terpisahkan,” tegas Yosef.

Rangkaian pengawasan komprehensif itu menjadi bukti komitmen BPOM menjaga kesehatan publik. Melalui penguatan kelembagaan dan modernisasi, BPOM berharap kemitraan strategis terus dikembangkan. Output kemitraan diharapkan meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko produk tidak sesuai ketentuan. (ANT/AZM)

Kemenhaj Umumkan Alokasi Kuota Haji 2027

JAKARTA, BANPOS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar jemaah haji reguler dalam alokasi kuota penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Jemaah bisa memeriksa status keberangkatan melalui laman resmi Kemenhaj sebelum tahapan pelunasan. Pemeriksaan kesehatan untuk penetapan istithaah diperlukan sebelum pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah yang telah memenuhi syarat.

Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyanwan menyebut daftar itu mencakup tiga kelompok jemaah yang berhak. Kelompok tersebut ialah jemaah lunas tunda berangkat,



Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyanwan

jemaah masuk alokasi kuota musim berjalan, serta jemaah lanjut usia yang diprioritaskan. Ian meminta jemaah memeriksa status masing-masing melalui laman resmi Kemenhaj secara berkala.

“Jemaah dapat memeriksa status masing-masing melalui laman resmi Kemenhaj. Setelah mengetahui statusnya, jemaah perlu mempersiapkan tahapan

berikutnya, terutama pemeriksaan kesehatan untuk memastikan pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan,” ujar Ian dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (28/10).

Pengecekan status keberangkatan dan informasi berhak lunas dapat dilakukan melalui laman <https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan?tab=berhak-lunas>. Jemaah

perlu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku bagi seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota. Penetapan istithaah kesehatan menjadi syarat sebelum pelunasan Bipih, dan pemenuhan itu menjadi bagian tahapan persiapan yang harus dilalui jemaah.

Kemenhaj mengimbau jemaah mempersiapkan kesehatan sejak dini dan mengikuti pemeriksaan di fasilitas kesehatan berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Jemaah juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal, mekanisme, dan ketentuan pelunasan Bipih melalui kanal resmi Kemenhaj. Koordinasi dengan kantor Kemenhaj setempat dapat dilakukan bila membutuhkan penjelasan lanjutan mengenai status, jadwal, dan tahapan persiapan haji.

“Kami mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi administrasi maupun kesehatan. Pastikan status keberangkatan telah diperiksa dan ikuti tahapan pemeriksaan kesehatan agar proses penetapan istithaah serta pelunasan dapat dilakukan sesuai ketentuan,” lanjut Ian. (AZM/RMID)

SELAMAT MEMPERINGATI

Hari Sumpah Pemuda

28 Oktober 2026

Berbeda-beda tetap satu tujuan, Indonesia maju

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Regional Loan Quality Jakarta 1** akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II**, terhadap barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama **MAMAH MARYAMAH** berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 02185/Ciakar luas tanah 72 m2 atas nama **MAMAH MARYAMAH** terletak di Blok V-16 no.16, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Perumahan Citra Raya Cluster Green Sevilla Blok V-16 no.16.

(Nilai Limit Rp 692.880.000,-; Penyetoran Jaminan Sebesar Rp 138.576.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
- Hari / Tanggal Lelang : Kamis / 12 November 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 Pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Persyaratan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan".
- Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan cicilan) serta harus efektif diterima KPKNL Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163356, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Consumer Collection Recovery & Asset Sales Division 2, Regional Loan Quality Jakarta 1, Cluster Loan Quality Tangerang 3 Telp. (021) 5539363.

Tangerang, 29 Oktober 2026

td

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
REGIONAL LOAN QUALITY JAKARTA 1

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Regional Loan Quality Jakarta 1** akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II**, terhadap barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama **ANGGI AZIZAH** berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 02206/Ciakar luas tanah 72 m2 atas nama **ANGGI AZIZAH** terletak di Blok M-3 No. 16, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (sesuai sertipikat), setempat dikenal dengan Perumahan Citra Raya Cluster Graha Siena Blok M-3 No. 16.

(Nilai Limit Rp 398.000.000,-; Penyetoran Jaminan Sebesar Rp 79.600.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
- Hari / Tanggal Lelang : Kamis / 12 November 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 12 November 2026 Pukul 09:45 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Persyaratan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan".
- Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan cicilan) serta harus efektif diterima KPKNL Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163356, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Consumer Collection Recovery & Asset Sales Division 2, Regional Loan Quality Jakarta 1, Cluster Loan Quality Tangerang 3 Telp. (021) 5539363.

Tangerang, 29 Oktober 2026

td

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
REGIONAL LOAN QUALITY JAKARTA 1

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit tanggal 15 September 2026 pada surat kabar harian Banten Pos dan pelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 22 September 2026, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi akan melaksanakan lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitur Jimmi Junaidi berupa :

- Sebidang tanah seluas 50 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya sesuai SHM No 7547 an. Jimmi Junaidi terletak di Avizesa Residence Unit 8 A, Jalan Poncol Raya Nomor 77, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

(Harga Limit Rp.650.000.000, Setoran Jaminan Rp.70.000.000.)

<ul style="list-style-type: none">Cara Penawaran : Terbuka, Melalui internet (<i>Open Bidding</i>)Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal : Kamis, 05 November 2026Waktu Penawaran : Sejak tayang di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaranBatas Akhir Penawaran : 05 November 2026, 09.00 WIB (sesuai Waktu Server)Alamat Domain Lelang : www.lelang.go.idTempat : KPKNL Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaranBea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelangPelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.Pemenang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1,1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang termasuk BPHTB dan tunggakan PBB.
--	--

Syarat-syarat lelang:

- Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemint lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Semanggi 08551003536.

Jakarta, 29 Oktober 2026

td

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Sudirman Semanggi

